

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM
ZONASI DALAM PENERIMAAN SISWA
BARU DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Fendi Wahyu Purwoko
151010033**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM
ZONASI DALAM PENERIMAAN SISWA
BARU DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Fendi Wahyu Purwoko
151010033**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 12 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

Fendi Wahyu Purwoko

NPM: 151010033

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM
ZONASI DALAM PENERIMAAN SISWA
BARU DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
FENDI WAHYU PURWOKO
151010033**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 12 Februari 2019

**Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP
Pembimbing**

ABSTRAK

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan untuk membentuk karakter bangsa. Pendidikan juga merupakan tempat utama dimana para penerus bangsa berjuang untuk mendapatkan pengetahuan yang layak dan dapat bersaing di kancah global. Berbicara mengenai pendidikan maka penelitian ini akan membahas salah satu kebijakan tentang pendidikan. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah kebijakan Sistem Zonasi. Sistem Zonasi adalah penerimaan siswa baru berdasarkan kedekatan domisili/tempat tinggal siswa dengan sekolah. Sistem Zonasi ini sendiri telah diatur dalam Permendikbud no.17 tahun 2017. Selain itu dinas pendidikan juga berkoordinasi bersama Walikota batam untuk dapat memberikan kebijakan turunan yang tepat yang bisa diterapkan di Kota Batam. Adapun kebijakan turunan dari Permendikbud no.17 Tahun 2017 adalah Peraturan Walikota Nomor: KPTS 153/HK/IV/2018 Tentang Satuan Pendidikan dan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018/2019, dan juga Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian melalui indikator tujuan kebijakan, masalah, tuntutan, dampak dan sarana atau alat kebijakan, diketahui bahwa kebijakan sistem zonasi ini sudah berhasil memenuhi tujuan dan mengatasi permasalahan yang sebelumnya ada, akan tetapi kebijakan ini juga menimbulkan dampak permasalahan baru yang mengakibatkan adanya tuntutan baru dari masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan; Kebijakan; Sistem Zonasi.

ABSTRACT

Education is a teaching and learning activity carried out to shape the character of the nation. Education is also a major place where the nation's successors struggle to gain proper knowledge and can compete in the global arena. Talking about education, this study will discuss one of the policies on education. One of the policies taken by the government to improve the quality of education in Indonesia is the Zonation System policy. The Zonation System is the acceptance of new students based on the proximity of the domicile / place of residence of students and schools. The Zonation System itself has been regulated in Permendikbud no.17 of 2017. In addition, the education office also coordinates with the Mayor of Batam to be able to provide appropriate derivative policies that can be applied in Batam City. The derivative policy of Permendikbud no.17 of 2017 is the Mayor's Regulation Number: KPTS 153 / HK / IV / 2018 concerning the Education Unit and the New Student Admission Committee (PPDB) of 2018/2019, and also Technical Guidelines for implementing new student admissions with this zoning system. The purpose of this study is to describe and analyze the Zonation System Policy in Accepting New Students in Batam City. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Based on the results of the research through indicators of policy objectives, problems, demands, impacts and means or policy tools, it is known that this zonation system policy has succeeded in meeting the objectives and overcoming problems that previously existed, but this policy also caused new problems that resulted in new demands from the community.

Keywords: *Education; Policy; Zonation System.*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmatnya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat mengerjakan laporan tugas akhir yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam hingga tuntas.

Penulis berharap semoga hasil dari penelitian skripsi ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca. Namun penulis juga menyadari bahwa skripsi ini belumlah sempurna, maka dari itu saya juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis juga menyadari dengan keterbatasan yang dimiliki penulis skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M, Si selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardi S.Hum., M.Pd selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Putera Batam.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
4. Bapak Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP selaku pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk selalu

membimbing penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
6. Bapak / Ibu Penguji Yang Bersedia untuk menjadi penguji serta memberikan kritik dan saran yang membangun.
7. Bapak Tobing, ST., M.Pd selaku Seksi Kelembagaan dan Sarpras Dinas Pendidikan Bidang SMP.
8. Bapak Drs. H. Sargono, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 11 Batam.
9. Bapak Sumadi, S.Pd selaku UR Sarpras SMPN 26 Batam.
10. Informan yang terlibat dalam penelitian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
11. Kedua orang tua saya ayahanda tercinta Marimin dan Ibunda tersayang Sumitun.
12. Teman-teman seperjuangan program studi Administrasi Negara 2015 yang sudah berkontribusi membantu saya dalam penelitian ini: Intan, Aidil, Firman, Feryanto, Freesma, Vivi, Aci, Taruli, Putri.

Batam, 5 Februari 2019

Fendi Wahyu Purwoko

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Teori Dasar.....	5
2.1.1 Kebijakan.....	5
2.1.2 Analisis Kebijakan.....	10
2.1.3 Sistem Zonasi.....	12
2.2 Penelitian Terdahulu.....	14
2.3 Kerangka pemikiran.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Jenis Penelitian.....	18
3.2 Fokus Penelitian.....	18
3.3 Sumber Data.....	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	20
3.5 Metode Analisis Data.....	21
3.6 Keabsahan Data.....	22
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	26
4.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan.....	26
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas pendidikan.....	27
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan.....	34
4.1.4 Profil Dinas Pendidikan.....	35
4.1.5 Profil SMP Negeri Kec. Batu Aji.....	39
4.2 Hasil Penelitian.....	39
4.2.1 Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Di Kota Batam.....	39
4.3 Pembahasan.....	53
4.3.1 Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Di Kota Batam.....	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	58
5.1 Simpulan.....	58
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN I PANDUAN WAWANCARA DAN DOKUMENTASI
LAMPIRAN II DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN
LAMPIRAN IV SALINAN PERMENDIKBUD NOMOR 17 TAHUN
2017 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Indikator Untuk Menenmukan Analisis Data.....	10
Tabel 3.1 Data Informan.....	19
Tabel 4.1 Daftar Pegawai PNS Dinas Pedndidikan.....	35
Table 4.2 Daftar Pegawai Kontrak Dinas Pendidikan.....	38
Table 4.3 Profil dan Daya Tampung SMP Negeri.....	39
Table 4.4 Peta Zonasi PPDB Batu Aji Tahun 2018.....	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	17
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data.....	22
Gambar 3.2 Jadwal Penelitian.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam kegiatan formal. Kegiatan pendidikan ini diperlukan untuk membentuk karakter bangsa, pendidikan juga merupakan tempat utama dimana para penerus bangsa berjuang dan bersaing untuk mendapat pengetahuan yang layak sehingga mampu bersaing di kancah global. Jadi dalam hal ini definisi pendidikan adalah proses atau perbuatan mendidik.

Pendidikan umumnya dibagi menjadi pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama/atas, dan kemudian perguruan tinggi universitas/magang. Melalui pendidikan diharapkan dapat melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Maka dari itu, demi mencapai tujuan dan harapan itu maka pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.

Terkait dengan masalah-masalah pendidikan, sektor pendidikan dituntut untuk lebih arif dan bijak dalam menghadapi tantangan global. Menurut Gudmund Hernes (Fattah, 2014:28) sedikitnya ada tujuh tantangan global yang dihadapi pendidikan, yaitu: 1) mengurangi kesenjangan dalam pemerataan pendidikan, kemiskinan, marginalisasi, dan eksklusivitas pendidikan, 2) mengukuhkan hubungan yang lebih baik antara pendidikan dan ekonomi setempat (lokal), dan

antara pendidikan dengan dunia kerja yang mengglobal, 3) mencegah berkembangnya riset dan pendidikan yang dikendalikan oleh pasar dan melebarnya kesenjangan teknologi dan ilmu pengetahuan di antara negara industri dan negara berkembang, 4) menjamin bahwa persyaratan riset negara berkembang menerima perhatian dan ditunjukkan oleh ilmuwan dan sarjananya, 5) mengurangi dampak negatif dari “ brain drain” dari negara miskin ke negara kaya, dan dari wilayah tertinggal ke wilayah maju, sebagai pasar untuk siswa yang juga mengglobal, 6) mengarahkan dampak dari prinsip-prinsip pemasaran dan perubahan dari negara terhadap pendidikan dan membantu perencanaan dan manajemen pendidikan, 7) menggunakan sistem pendidikan tidak hanya untuk memindahkan batang tubuh keilmuan secara umum, bahasa seni, gaya hidup di dunia yang semakin menjadi homogen.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia adalah kebijakan SISTEM ZONASI. Sistem Zonasi adalah penerimaan siswa baru berdasarkan kedekatan domisili/tempat tinggal siswa dengan sekolah. Sistem Zonasi ini sendiri telah diatur dalam Permendikbud no.17 tahun 2017. Selain Permendikbud no.17 tahun 2017, untuk penerapan kebijakan ini di Kota Batam juga melakukan pertimbangan dengan Perda Kota Batam Nomor 4 tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 (Sianturi, Tribun Batam, 2017).

Menurut data yang di muat oleh batamnews.co.id (Nurul Indra, Rabu 30 Mei 2018) menyebutkan bahwa pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di Batam akan segera dibuka. Dewan Pendidikan Kota Batam (Sudirman Dianto) sepakat

tetap menggunakan Sistem Zonasi. Berikut penjelasan mengenai Sistem Zonasi tersebut:

1. Zonasi wilayah

Konsep zonasi yang digunakan adalah zonasi berbasis wilayah, bukan administrasi. Artinya penerimaan calon siswa baru yang dekat dengan sekolah.

2. Prioritas siswa ekonomi lemah

Sistem zonasi wilayah tersebut 20% diprioritaskan untuk calon siswa dengan perekonomian lemah.

3. Kuota lain

Calon siswa dari luar batam 5%, dan calon siswa berprestasi non akademik 5%.

4. Arahkan untuk siswa ekonomi mampu

Calon siswa yang orangtuanya mampu, agar memilih sekolah swasta.

5. Solusi untuk sekolah dekat

Sistem zonasi dibuat agar tidak ada lagi keluhan tak bisa sekolah di dekat tempat tinggal mereka.

Dikutip dari batampos.co.id, (F Cecep Mulyana, 6 juli 2018) penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini kembali bermasalah di Batam. Permasalahan masih sama yakni daya tampung sekolah. Banyak anak-anak yang tak tertampung karena keterbatasan lokal ataupun sekolah di lingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat juga tidak bisa berbuat banyak dengan sekolah negeri sebab Penerimaan Peserta Didik Baru kali ini juga menggunakan sistem zonasi. Jika di

lingkungannya tidak ada lagi sekolah negeri yang menampung tentu tidak ada pilihan ke sekolah negeri di lingkungan lain karena terbentur aturan zonasi tadi. Dikarenakan hal inilah peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN SISWA BARU DI KOTA BATAM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru di Kota Batam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Agar dapat menjadi rujukan pengembangan keilmuan dalam ilmu administrasi publik, khususnya kebijakan public.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan terkait dengan Kebijakan Sistem Zonasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Kebijakan

Sehubungan dengan ini Mac Rae dan Wilde (Suandi, 2010) mengartikan kebijakan publik sebagai : Serangkaian tindakan yang dipilih oleh Pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Pengertian ini mengandung maksud bahwa kebijakan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai, yang merupakan pilihan Pemerintah dan kebijakan tersebut mempunyai pengaruh dan dampak terhadap sejumlah besar orang. Karena kebijakan merupakan suatu rangkaian tindakan, maka suatu contoh misalnya keputusan seorang Rektor menerima seorang mahasiswa pindahan dari universitas lain, maka itu tidak dapat disebut sebagai kebijakan.

Rose (Hamdi, 2014:36) mengartikan kebijakan lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan.

Thomas R.Dye dalam (Suandi, 2010) mengemukakan, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih atau dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah banyak berpikir; mereka mengatur konflik di dalam masyarakat; mereka mengatur masyarakat untuk melakukan konflik dengan masyarakat lain; mereka mendistribusikan berbagai penghargaan simbolik dan layanan material kepada anggota masyarakat; dan mereka mengambil uang dari masyarakat, paling sering

dalam bentuk pajak. Dengan demikian kebijakan publik dapat bersifat regulatif, organisasional, distributif, atau ekstraktif - atau semua hal ini sekaligus.

Easton (Islamy, 2010) menyatakan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa(sah), kepada seluruh anggota masyarakat.

Ciri-ciri umum kebijakan, ciri adalah keterangan yang menunjukkan sifat khusus dari sesuatu. Orang mengenal sesuatu karena berdasarkan keterangan tersebut. Demikian pula dengan kebijakan. Tanpa mengetahui sifat khusus atau ciri-ciri dari kebijakan, sulit dibedakan antara kebijakan dengan keputusan biasa dalam birokrasi pemerintah. Kebijakan adalah keputusan, tetapi tidak semua keputusan adalah kebijakan. Anderson dan kawan-kawan (Islamy, 2010) mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan sebagai berikut:

1. Setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya pembuatan kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan yang ada dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
4. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang an dapat juga berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

5. Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mengikutinya.

Selain ciri-ciri kebijakan juga ada unsur-unsur kebijakan Abidin (2012:25-

33). Dilihat dari segi struktur, terdapat lima unsur kebijakan, yaitu:

1. Tujuan kebijakan

Telah dipahami bahwa sebuah kebijakan dibuat karena adanya tujuan yang ingin dicapai, kebijakan yang baik mempunyai tujuan yang baik. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian, tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan.

2. Masalah

Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah yang tepat, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan.

3. Tuntutan

Tuntutan muncul karena salah satu dari duab sebab. Pertama, karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka. Kedua, karena kebutuhan baru yang muncul setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan.

4. Dampak

Dampak ini merupakan tujuan lanjutan yang muncul sebagai pengaruh dari pencapaian suatu tujuan.

5. Sarana atau alat kebijakan

Suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan sarana yang dimaksud. Beberapa dari sarana ini dapat disebutkan antara lain: kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis, dan perubahan dari kebijakan itu sendiri.

Sebagai suatu hasil proses penyelenggaraan pemerintahan, substansi kebijakan publik dapat dibedakan atas berbagai kelompok dan tipologi. Tipologi yang paling banyak diikuti oleh para ahli kebijakan publik adalah tipologi yang dibuat oleh Theodore J. Lowi. Menurut Lowi (Hamdi, 2014:54) kebijakan publik dapat dibedakan atas tiga tipe, yakni kebijakan distributif, kebijakan redistributif, dan kebijakan regulatory. Kebijakan distributif adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa bagi warga negarabaik secara perorangan maupun dalam wujud masyarakat. Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengaliran barang dan sumber daya dari suatu kelompok warga negara kepada kelompok warga negara lainnya. Kebijakan pengaturan adalah kebijakan yang berkaitan dengan pengarahan atau pembatasan perilaku warga negara dan masyarakat. Berdasarkan pernyataan para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah jawaban terhadap suatu masalah sebagai upaya untuk memecahkan atau mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan substansinya Anderson (Hamdi, 2014:55) membedakan antara kebijakan substantif dan kebijakan prosedural. Kebijakan substantif menyangkut hal-hal yang sedang dilakukan pemerintah, seperti pembuatan jalan atau larangan penjualan minuman keras. Sedangkan kebijakan prosedural adalah kebijakan yang

berkaitan dengan penentuan cara-cara sesuatu hal akan dilakukan atau siapa yang akan melakukannya. Dengan demikian kebijakan prosedural mencakup hal-hal yang bertalian dengan organisasi, seperti lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu peraturan, dan merinci proses atau persyaratan dan tata cara yang berkaitan dengan tindakan-tindakan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Sebuah kebijakan dalam pembuatannya memerlukan serangkaian proses. Proses kebijakan dalam praktiknya mempunyai rinciannya sendiri. Proses kebijakan, baik model linier maupun sirkuler, perlu dimulai dengan isu kebijakan. Penggunaan kata isu dinilai lebih tepat dibandingkan dengan kata masalah, hal ini dengan pertimbangan bahwa masalah adalah sesuatu hal yang telah terjadi, suatu kesalahan dalam masyarakat yang harus dipecahkan. Sementara itu, kebijakan adalah untuk mengembangkan negara-negara berkembang dari negara yang kurang berkembang menjadi negara yang lebih berkembang. Oleh karena itu kebijakan bukanlah tentang apa yang benar-benar ada sebagai masalah, kebijakan adalah tentang maksud yang diciptakan untuk masa depan. Kebijakan adalah tentang masyarakat masa depan. Oleh karena itu, kita memajukan pemahaman kebijakan publik di negara-negara berkembang karena pemerintah serta negara akan memutuskan strategi untuk mewujudkan misi bangsa dan visi pemimpin bangsa. Oleh karena itu, kebijakan publik merupakan strategi untuk membawa masyarakat saat ini memasuki transisi untuk mencapai konsep masyarakat yang ideal.

Analisis kebijakan diperlukan untuk menentukan apakah isu merupakan isu kebijakan atau tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan apakah suatu isu merupakan kebijakan atau bukan?

Tabel 2.1 Indikator Untuk Menemukan Analisis Data

No	Masalah	Masalah Publik
1	Kepentingan umum	Kepentingan umum dan strategis
2	Penting	Strategis, lebih dari penting
3	Menarik	Menarik dan berpengaruh terhadap kepentingan publik
4	Timelines, tetapi dampak jangka panjang kurang	Timelines, dampak jangka panjang
5	Negatif	Positif
6	Fokus untuk apa yang telah terjadi	Fokus yang ada dan berpotensi untuk terjadi
7	Tidak perlu tindakan kebijakan	Tindakan kebijakan yang diambil

Sumber: (Nugroho, 2015:121)

2.1.2 Analisis Kebijakan

Patton dan Sawicki (Fattah, 2014:3) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan.

Selanjutnya Duncan Macrae (Fattah, 2014:3) mengartikan analisis kebijakan sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.

Selanjutnya William Dunn (Fattah, 2014:5) mengartikan analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inkuiri dan

argumentasi berganda untuk menghasilkan dan mendayagunakan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka memecahkan masalah kebijakan.

Ericson (Wahab, 2014:40), dalam tulisannya merumuskan analisis kebijakan sebagai penyelidikan yang berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan social yang diinginkan.

Dror (Wahab, 2014:40), mendefinisikan analisis kebijakan sebagai suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif yang dikehendaki berkenaan sejumlah isu yang kompleks

Mengacu pada Dunn (Suharto, 2012:85-86), ada tiga bentuk atau model analisis kebijakan, yaitu model prospektif, model retrospektif dan model integratif.

1. Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan 'sebelum' suatu kebijakan diterapkan.
2. Model retropektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan 'setelah' suatu kebijakan diimplementasikan.
3. Model integratif adalah model perpaduan antara dua model diatas. Model ini kerap disebut model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan diimplementasikan.

2.1.3 Sistem Zonasi

Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik (dibuktikan dengan KK) dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kecamatan/Kelurahan serta merupakan rangkaian proses dari penerimaan peserta didik.

Menurut pasal 15 permendikbud no.17 tahun 2017 SISTEM ZONASI dalam PPDB adalah sebagai berikut:

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.

- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
- a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Selain permendikbud diatas, dalam penerimaan peserta didik baru Bapak Walikota Batam juga mengeluarkan Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ini. Di bawah ini merupakan isi dari petunjuk teknis tersebut:

1. Zonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik (dibuktikan dengan KK) dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kecamatan/Kelurahan serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik;
2. Pembagian wilayah dalam zonasi berdasarkan Kesepakatan Kecamatan, kelurahan, Komite Sekolah dan Kepala Sekolah;

3. Klasifikasi zonasi terdiri dari dalam zona, luar zona, luar kota Batam, dan luar provinsi;
4. Ketentuan zonasi penerimaan peserta didik baru sebagai berikut; a. Penerimaan peserta didik dari dalam zona paling sedikit 90 % dari daya tampung satuan pendidikan; b. Penerimaan peserta didik dari luar zone paling banyak 5 % dari daya tampung satuan pendidikan; c. Penerimaan peserta didik dariluar Kabupaten/Kota paling banyak 5 % dari daya tampung satuan pendidikan;

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

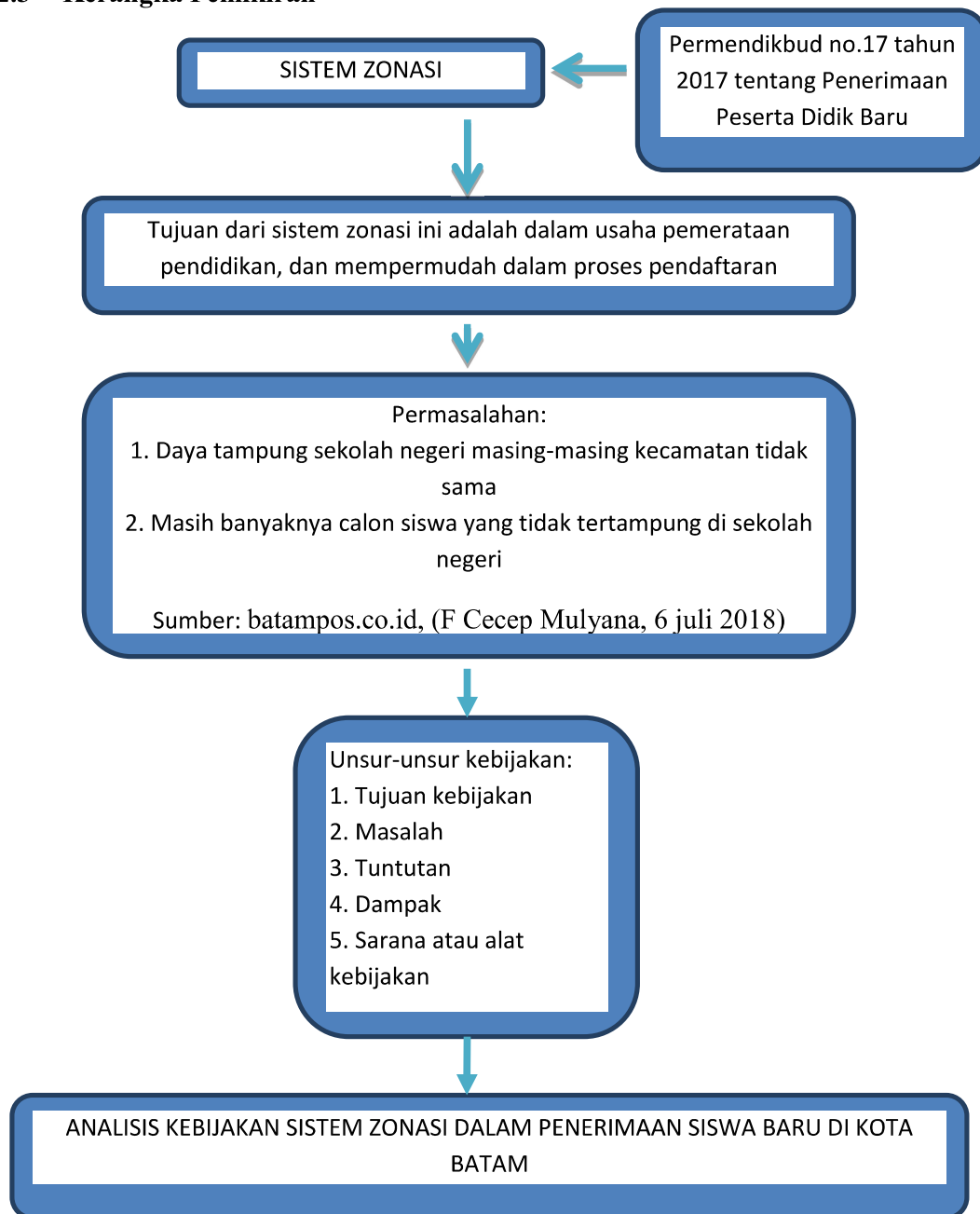
1. Munawar Sholeh;2011 dengan judul penelitian sebagai berikut: Analisis Kebijakan Nasional Tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Periode 2003-2006 Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Subtansi Kebijakan-kebijakan Implementatif Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dalam Rangka Pemerataan Pendidikan.
2. Rosanita (2016)dengan judul penelitian Analisis Kebijakan Menteri Pendidikan Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: kurikulum adalah seperangkat rencana pelajaran, pengaturan tujuan, konten dan materi pembelajaran yang dikembangkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang digunakan saat ini adalah

kurikulum tahun 2013. Implementasi kurikulum 2013 bertujuan kompetensi siswa agar lebih analitik dan membuat para guru lebih kreatif dan inovatif selama proses pembelajaran.

3. Afifah & Yuningsih (2016) dengan judul penelitian Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak di Cianjur. Dengan hasil penelitian bahwa kabupaten cianjur telah mengeluarkan beberapa kebijakan, namun faktanya sampai saat ini permasalahan perdagangan manusia belum teratasi dengan baik. Dengan salah satu faktornya adalah lemahnya koordinasi dan kerjasama antar anggota gugus tugas.
4. Dissas (2017) dengan judul penelitian Analisis Kebijakan Pendidikan Mengenai Pengembangan dan Peningkatan Profesi Guru. Dan hasil penelitiannya adalah dengan adanya kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru, posisi guru semakin dinaungi oleh sumber hukum, serta dengan adanya pendidikan profesi guru, guru menjadi lebih memiliki pengetahuan dan profesionalisme sebagai guru.
5. Muyaheed hiley & Soenarto (2013) Analisis Kebijakan Pengembangan Sekolah Lukmanulhakeem Yala Thailand. Dengan hasil penelitian sebagai berikut, 1. Perencanaan kebijakan pengembangan sekolah belum efektif, 2. Berbagai input pengembangan sekolah sudah mencukupi kebutuhan warga sekolah, 3. Pelaksanaan kebijakan sekolah terkendala karena kebijakan yang tidak komprehensif, 4. Outcome kebijakan

berdampak negatif, sehingga sekolah tidak mengembangkan sesuai kapabilitas yang dimiliki.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis (Sugiyono, 2014:2).

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber dimaksudkan untuk menyajikan data yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley (Sugiyono, 2014:209), adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Karena adanya keterbatasan tenaga, dana dan waktu, serta supaya hasil penelitian lebih terfokus maka peneliti tidak akan melakukan penelitian secara keseluruhan mengenai kebijakan Sistem

Zonasi di Kota Batam. Maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru di kota Batam, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan SMP Negeri yang ada di Bati Aji. Dalam penelitian ini, peneliti focus menggunakan indicator unsure-unsur kebijakan, yakni sebagai berikut: tujuan kebijakan, masalah, tuntutan, dampak, dan sarana atau alat kebijakan.

3.3 Sumber Data

Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Informan, kata kata dan tindakan dari informan yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data yang memadai dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data harus memenuhi syarat tersebut (Sugiyono, 2013:400). Kemudian informan di klasifikasikan berdasarkan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Table 3.1 Data Informan

INFORMAN	
Bapak Tobing, M.Pd	Seksi Sarpras dan Kelembagaan Bidang SMP
Bapak Drs. H. Sargono, M.Pd	Kepala Sekolah SMPN 11 Batam
Bapak Sumadi, S.Pd	UR. Sarana dan Prasarana
Bapak Anton	Orang Tua siswa
Bapak Sanusi	Orang Tua siswa
Ibu Sari	Orang Tua Siswa

(Sumber: Hasil Observasi)

- b. Dokumen, yang digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang digunakan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan adalah dokumen arsip dari Dinas Pendidikan.
- c. Tempat dan peristiwa, sebagai sumber data tambahan dilakukan melalui observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru di Kota Batam khususnya di Dinas Pendidikan dan SMP Negeri di Kecamatan Batu Aji.

Spradley mengemukakan bahwa, informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya
2. Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:137) terdapat tiga macam teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, angket, dan observasi, yaitu :

- a. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.
- b. Kuesioner (Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya
- c. Observasi. Peneliti melakukan observasi dengan secara langsung datang ke kantor Dinas Pendidikan Kota Batam.

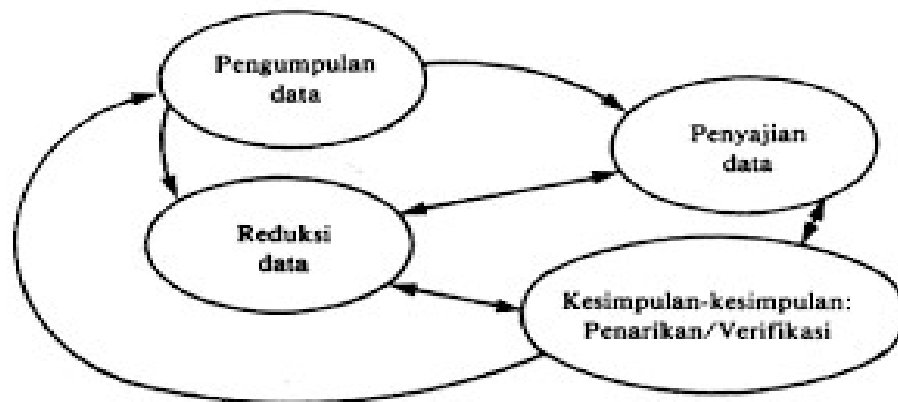
3.5 Metode Analisis Data

Miles dan huberman (Sugiyono, 2014: 246-247), bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya menjadi jenuh. Aktifitas dalam analisis ini meliputi:

- a. Data reduction (reduksi data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal- hal pokok, memfokuskan pada bagian-bagian yang penting, dicari temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.
- b. Data display (penyajian data)
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang paling sering digunakan dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion drawing/ verification (penarikan kesimpulan/verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model)

(Sumber: Sugiyono, 2014:24)

3.5 Keabsahan Data

Menurut J. Moleong (2006:324-326) mengemukakan bahwa terdapat beberapa kriteria untuk memeriksa keabsahan data yaitu : derajat kepercayaan, keteralihan (*transferability*), dan ketergantungan (*dependability*).

Penerapan uji kredibilitas disini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat trigulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu / situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kapasitas datanya (Sugiyono, 2014:127).

Derajat keteralihan atau *Transferability* merupakan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian dalam situasi lain. Oleh karena itu, orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Bila

pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*) maka laporan tersebut memenuhi standar *transferabilitas*, Sanafiah Faisal dalam (Sugiyono, 2014:277)).

Dalam penelitian kualitatif uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti, Sanafiah Faisal (Sugiyono, 2014:277)).

3.6 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

a. Lokasi

Untuk lokasi penelitian, peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Dinas Pendidikan Kota Batam. Selain di Dinas Pendidikan peneliti juga melakukan penelitian di sekolah SMP Negeri di Kecamatan Batu Aji. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan objek penelitian mengenai sistem Zonasi dalam penerimaan siswa baru.

b. Jadwal Penelitian

N O	Kegiatan	Bulan															
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Pustaka																
2	Penyusunan Proposal																
3	Pengumpulan Data																
4	Penelitian Lapangan																
5	Pengolahan Data																
6	Analisis dan Kesimpulan																
7	Penulisan Laporan Akhir																
8	Penyerahan Laporan																

Gambar 3.2 Jadwal Penelitian